KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT TATA NEGARA SUB DIREKTORAT PARTAI POLITIK	Nomor SOP	AHU.UM.01.01 - 1760
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo R. Muzhar NIP. 196909181994031001
	Judul SOP	**SOP Pengajuan Surat Kuasa Advokasi Permasalahan Partai Politik**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 5.Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta	1. Sarjana Hukum 2. Jabatan Analis Pertimbangan Hukum

Perubahan Kepengurusan Partai Politik	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Persuratan	Komputer, Printer, Scanner Berkas-berkas persyaratan/ Materi Hukum Alat Komunikasi Peraturan Perundang-Undangan Surat Panggilan Sidang dan Surat Gugatan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku dokumentasi Surat Keluar

SOP Pengajuan Surat Kuasa Advokasi Permasalahan Partai Politik

No.	Kegiatan	Pemangku Jabatan				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari dan meneliti surat gugatan, membuat disposisi kepada Kasubdit Partai Politik untuk menyiapkan Surat Kuasa Menteri	mulai				Surat Panggilan Sidang, Surat Gugatan	1 jam	Disposisi	Pengadministrasian di Tata Usaha
2	mempelajari disposisi Direktur, meneliti, menelaah dan memberikan disposisi kepada Kasi Analisis, Pertimbangan, dan Advokasi Partai Politik untuk merumuskan konsep dasar Surat Kuasa Menteri					Disposisi, Surat Panggilan Sidang, Surat Gugatan	2 jam	Disposisi	Surat Gugatan, Jawaban Gugatan dan Lembar Disposisi di dokumentasikan oleh Pejabat Pelaksana
3	mempelajari disposisi Kasubdit, menelaah, menyiapkan konsep dasar Surat Kuasa Menteri dan memberikan disposisi kepada Pelaksana untuk menyiapkan konsep surat Kuasa Menteri					Disposisi, Surat Panggilan Sidang, Surat Gugatan	5 jam	Disposisi	
4	mempelajari disposisi Kasi, menganalisa, menyiapkan data dukung dan mengembangkan konsep dasar surat Kuasa Menteri sesuai dengan UU No 2 Tahun 2011 dan Permenkumhan No 34 tahun 2017 mengetik Konsep Surat Kuasa dan konsep Nota Dinas hingga Menteri kemudian menyampaikan kepada Kasi					Surat Panggilan Sidang, Surat Gugatan, Konsep Surat Kuasa Menteri	2 hari	Konsep Surat Kuasa, Nota Dinas	
5	memeriksa, memverifikasi, mengoreksi dan memberi paraf konsep Surat Kuasa Menteri dan menandatangani nota dinas serta menyampaikan kepada Kasubdit. Jika tidak menyetujui dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki					Surat Panggilan Sidang, Surat Gugatan, Konsep Surat Kuasa Menteri, Nota Dinas	4 jam	Konsep Surat, Nota Dinas	
6	memeriksa, memverifikasi, mengoreksi dan memberi paraf konsep Surat Kuasa Menteri dan menandatangani nota dinas, memerintahkan pejabat pelaksana untuk meminta tandatangan Para Kuasa Hukum serta menyampaikan kepada Direktur. Jika tidak menyetujui dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki					Surat Panggilan Sidang, Surat Gugatan, Konsep Surat Kuasa Menteri, Nota Dinas	4 jam	Konsep Surat, Nota Dinas	Proses Pengiriman ke TU oleh Pejabat Pelaksana setelah ditandatangani oleh Para Kuasa Hukum
7	mengetahui, menyetujui dan memberi paraf konsep Surat Kuasa Menteri dan menandatangani nota dinas serta disampaikan kepada Dirjen untuk diproses lebih lanjut. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubdit untuk diperbaiki					Surat Panggilan Sidang, Surat Gugatan, Konsep Surat Kuasa Menteri, Nota Dinas	4 jam	Konsep Surat, Nota Dinas	Pengadministrasian di Tata Usaha
8.	Surat Kuasa didokumentasikan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara				selesai	Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh para kuasa hukum dan sudah bermaterai	4 jam	Surat Kuasa Menteri	Surat Kuasa didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

